BAB IV

ANALISA HASIL

A. Analisis Terhadap Praktik Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa di Pengadilan Agama Sidoarjo gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama oleh penggugat selaku ahli waris dan dapat pula menggunakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya. Pengajuan gugatan waris disertai dengan bukti kematian pewaris dari Lurah/Kepala Desa dan silsilah ahli warisnya dan dipersiapkan pula dokumen bukti-bukti kepemilikan objek sengketa seperti sertifikat, akta jual beli, dan bukti kepemilikan lainnya.

Dalam surat gugatan harus memuat secara lengkap objek-objek sengketa mengenai ukuran dan batas-batasnya tanah, merek dan tahun pembuatan dan kalau perlu dengan warnanya jika objeknya berupa mobil/Sepeda motor atau barang-barang elektronik. Pengajuan gugatan waris diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi letak barang tetap (objek sengketa) itu berada, kecuali barang-barang sengketa itu menyebar kepada beberapa wilayah Pengadilan Agama, maka

penggugat dapat memilih salah satunya Pengadilan Agama dimana objek sengketa waris itu berada.

Penggugat membayar panjar biaya perkara, untuk Pengadilan Agama, pembayarannya melalui Bank dan jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 (SKUM) yang didasarkan pada PP 53 tahun 2008 dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo tentang panjar biaya perkara. Bagi yang tidak mampu/miskin dapat mengajukan gugatan waris secara cuma-cuma/prodeo, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh camat. Setelah gugatan didaftarkan di Pengadilan Agama, penggugat/kuasanya tinggal menunggu panggilan sidang yang disampaikan oleh juru sita. Panggilan disampaikan minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

B. Analisis Terhadap Kendala yang Dihadapi Dalam Pembagian Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo

Berdasarkan putusan No. 2917/Pdt.G/2014/PA.Sda pada bab 3 Pengadilan Agama khususnya para Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut mengalami sedikit kendala dalam menangani perkara waris tersebut. Dikarenakan sesuai dengan putusan tersebut pihak Tergugat tidak pernah hadir sekalipun di setiap persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 08 Oktober 2014, 21 November 2014 dan terakhir tanggal 25 Februari 2015 Tergugat telah

dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir. Karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara tersebut tidak layak dilakukan mediasi. Meskipun di setiap persidangan berlangsung para Majelis Hakim sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk berdamai dan kembali rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap dengan gugatannya. Maka para Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan verstek karena Tergugat tidak pernah hadir.

Istilah verstek dalam kamus hukum ialah sebagai terjemahan dari verstek prosedur, dan verstek vonis yang diberi istilah putusan tanpa hadir atau putusan diluar hadir tergugat atau penggugat. Sedangkan menurut Soepomo menyebut “acara luar hadir” (verstek), di lain pihak, subekti tetap mempergunakan istilah aslinya perstek bukan verstek.⁵⁹ Dengan demikian putusan verstek ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.⁶⁰

⁵⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika 2006), 381

⁶⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2005), 156

C. Analisis Terhadap Penyelesaian Perkara Kewarisan Islam di Pengadilan Agama Sidoarjo Sudah Sesuai Dengan Hukum Waris Islam

Hasil putusan dari para Majelis Hakim berdasarkan Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Diketahui pihak Penggugat dan Tergugat selama perkawinan tidak mempunyai anak, Yang di pakai sebagai pedoman penyelesaiannya adalah Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نَصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ قَلْبِي وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ قَلْبِي

Artinya: Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu.

Penggugat dan Tergugat masih memiliki saudara kandung 2 orang lebih sebagai ahli waris Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11:

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهُ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ قَلْبِي

Artinya: Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.

Ahli waris Penggugat dan Tergugat terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 176:

إِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ قُلَى

Artinya: *Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan.*

Dalam rangka melaksanakan tugas pembagian harta peninggalan seseorang yang beragama Islam (perkara warisan), apabila dilihat dari segi hukum formil dapat ditinjau dari dua sudut ketentuan, yakni sebagai berikut:⁶¹

Pembagian Berdasarkan Putusan Pengadilan

Pembagian harta warisan berdasarkan kepada putusan pengadilan ini juga termasuk fungsi kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas eksekusi dengan syarat:

1. Putusan yang bersangkutan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau terhadap putusan tersebut tidak ada lagi (atau tidak dimungkinkan lagi) untuk melakukan upaya hukum dalam bentuk banding atau kasasi. Atau bisa juga perkara yang bersangkutan diputus dalam tingkat banding atau kasasi.

⁶¹ Surahwardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, (Jakarta : sinar grafika 2007), 16

2. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut mengandung “amar” atau “diktum” yang bersifat *condemnatoir*. Adapun yang dimaksud dengan *amar* yang bersifat *condemnatoir* tersebut bahwa salah satu amar putusan mengandung pernyataan menghukum para ahli waris melakukan pembagian atau amar yang memerintahkan pembagian, dan bisa juga amar yang berbentuk melaksanakan pembagian. Dan hanya putusan yang seperti tersebut dapat dieksekusi melalui kewenangan pengadilan (Ketua Pengadilan)

Pembagian Berdasarkan Permohonan

Maksudnya, bahwa Pengadilan Agama selain melakukan pembagian berdasarkan keputusan juga dapat melakukan pembagian berdasarkan atas permohonan pertolongan dari pihak-pihak yang berkepentingan:

1. Harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan.
2. Ada permohonan minta tolong dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris.

Apabila kedua persyaratan itu telah terpenuhi, selanjutnya Pengadilan Agama dapat melaksanakan pembagian sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236 a HIR. Dan seandainya permohonan minta tolong itu hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris si mayit) maka Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan pembagian dengan dalih/berdasarkan ketentuan Pasal 236 a HIR.